

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dunia bisnis di Indonesia yang terus berkembang secara maju dengan diiringi ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi dan keadaan perekonomian yang semakin bertambah baik dapat menimbulkan munculnya persaingan di dalam dunia bisnis. Hal ini menjadikan setiap industri di haruskan menciptakan laba selaku salah satu upaya menggapai tujuan industri. Kenaikan nilai industri bisa dilihat dari kenaikan pemegang saham. Agar dapat mengacu pada peningkatan nilai industri, dituntut agar dapat mengelola keuangan industri secara efisien serta efektif.

Selain pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan juga sebagai bentuk mampu tidaknya perusahaan dalam melaksanakan aktivitas dengan ketentuan undang – undang yang berlaku. Adanya krisis ekonomi di beberapa negara memberikan dampak negatif terhadap adanya isu yang terkait tata kelola keuangan di perusahaan yang baik yang juga sering disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Isu ini muncul akibat rendahnya tata kelola perusahaan yang baik. Pada pertengahan tahun 1997 terjadi masalah yang disebabkan oleh GCG yang mengakibatkan terjadinya krisis moneter. *GCG* diartikan juga sebagai proses yang terstruktur yang dapat digunakan sebagai program perusahaan (pemilik saham / pemegang modal, komisaris / dewan pengawas, serta direksi) agar dapat mencapai keberhasilan usaha dan agar akuntabilitas perusahaan tetap dapat

memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, yang dilandaskan aturan undang – undang dan nilai – nilai etika yang berlaku.

Diperlukan adanya mekanisme pemantauan pengendalian secara internal, pengendalian ini dapat berupa adanya dewan komisaris, direksi, komite audit, juga kepemilikan institusional (Churniawati,*et al.*, 2019 ; Tarigan dan Prawihatmi, 2018 ; Situmorang dan Simanjuntak, 2019). Dalam perundang – undangan Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 ayat 9 dalam Agoes dan Ardana (2014;108), tugas dari dewan komisaris yaitu melaksanakan pengawasan secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar serta sebagai penasihat direksi.

Mekanisme kedua adalah direksi. Menurut Kuswiranto (2016: 29), dewan direksi sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan hal itu berdampak pada kepentingan serta tujuan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam ataupun di luar pengendalian, agar dapat sesuai dengan syarat anggaran dasar. Sebagai pengurus perseroan, direksi sebagai agen perseroan, sehingga tidak dapat melakukan sesuai keinginannya sendiri. Apa yang dikerjakan oleh direksi diluar wewenang dan tanggungjawab perseroan akan dipertanggung jawabkan.

Mekanisme GCG ketiga adalah Komite Audit sebagai suatu komite yang wajib terbebas dari pengaruh manajemen industri serta mempunyai watak independen. Tujuan dibentuknya komite audit agar dapat membangun pengawasan dan juga pengendalian untuk tetap berjalan secara efektif.

Mekanisme penerapan GCG keempat adalah Kepemilikan institusional ini juga sebagai perusahaan yang melakukan investasi mengatas namakan individu atau perusahaan. Kepemilikan institusional juga sebagai monitoring dalam majanemen yang melakuakan pengawasan dengan lebih optimal terhadap kinerja manajemen dalam perusahaan. Kepemilikan institusional juga dapat mengurangi pengaruh yang datang dari para pemegang saham lainnya, manajer ataupun *steholder*. Sehingga semakin banyaknya kepemilikan institusional di dalam perusahaan akan menjadi semakin baik dan terkontrol sehingga dapat menjadi pemegang saham mayoritas.

Indonesia pernah mengalami krisis keuangan yang sangat serius, yang disebabkan oleh penerapan GCG oleh perusahaan yang rendah dimana terkait dengan pelaksanaan pelaporan perusahaan terkait dengan kinerja yang dicapainya, serta masih kurang maksimalnya pengawasan keseluruhan aktivitas dari manajemen perusahaan. Penerapan GCG yang baik diyakini bisa berdampak pada *board* dan manajemen dengan tercapai tujuan perusahaan yang dapat dilihat dari kinerjanya.

Kinerja keuangan dilihat sebagai bagian dari pengelolaan perusahaan pada aset secara terperinci dan lebih efektif dalam waktu yang sudah ditentukan. Diperlukannya kinerja keuangan bagi suatu perusahaan agar perusahaan dapat mengetahui dan sebagai bahan evaluasi pencapaian perusahaan atas pekerjaan yang dijalankan. Pengukuran dalam kinerja juga

digunakan upaya mengukur tingkat keberhasilan keputusan yang telah diambil.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul Proposal Skripsi tentang “Pengaruh *GCG* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019”.

B. Permasalahan

Masalah *GCG* dapat diketahui dari beberapa pengembangan dari beberapa teori yaitu salah satunya terdapat pada teori *agency theory* yang menjelaskan bagaimana banyaknya pihak – pihak terlibat di perusahaan yang berperilaku (Marjono dan Ningsih, 2016). Pihak yang berada di dalam perusahaan tersebut seperti manajer, pemilik saham serta kreditor. Timbulnya masalah ini dikarenakan adanya pembatas antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut dikelola oleh tenaga yang profesional yang independen, sedangkan pemilik perusahaan hanya sebagai dewan komisaris yang bertugas mengawasi keseluruhan aktivitas perusahaan.

Salah satu penyebab permasalahan nyata adanya pelaksanaan *GCG* yang gagal dalam waktu dekat ini merupakan skandal yang dirasakan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), ini menjadi salah satu industri asuransi terbanyak di Indonesia. Dilansir dari spa-febui.com pada tahun 2019 kemarin, PT Jiwasraya yang terjerat skandal finansial berdampak pada macetnya ekuitas menyebabkan perusahaan sampai tidak sanggup membayar kewajiban klaim polis JS Saving Plan. Akibat tunggakan polis ini

timbul dari para nasabah yang menginvestasikan dana mereka di JS Saving Plan dengan harapan return besar sebab tawaran jaminan return sebesar 9-13% yang pada dikala itu relatif besar dibanding bunga sebesar 5- 7% yang ditawarkan deposito Berinvestasi Di Reksa Dana : Memahami Tipe, Tata cara Valuasi serta Kinerja. Kepala BPK RI, Agung Firman Sampurna, menarangkan kalau pemicu kandas bayarnya polis asuransi JS Saving Plan diakibatkan industri memakai dana dari JS Saving Plan buat berinvestasi di saham berbahaya besar. Dalam hasil audit yang dikemukakan BPK, PT Jiwasraya sering melaksanakan transaksi jual beli saham dan diprediksi melaksanakan rekayasa harga dengan Bank BJB (BJBR), Semen Baturaja (SMBR), serta PT PP Properti Tbk (PPRO) yang mempunyai kinerja saham- 39, 32%,- 74, 78%, serta- 41, 28% secara berentetan pada tahun 2019. Ditambah lagi, hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Pricewater house Coopers (PwC) Indonesia atas laporan keuangan PT Jiwasraya tahun 2017 mengoreksi jumlah laba laporan keuangan interim dari sebesar Rp2, 4 triliun jadi cuma Rp428 miliar. Akurasi dari kedua hasil audit ini nampak menguat dikala Hexana Tri Sasongko, Direktur Utama Jiwasraya, setelah itu mengatakan kalau Jiwasraya mempunyai peninggalan industri tercatat cuma sebesar Rp23, 26 triliun, sebaliknya kewajibannya menggapai Rp50, 5 triliun yang berarti industri mempunyai ekuitas negatif Rp27, 24 triliun.

Dikutip dari liputan6.com bahwa kasus pelanggaran prinsip *GCG* juga terjadi pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang diduga mengalami kerugian lebih dari Rp 10 trilliun pada januari

2020. Terjadinya kerugian tersebut akibat pengelolaan yang kurang maksimal, sehingga investasi anjlok.

Kasus rendahnya penerapan GCG juga terjadi pada PT. Taspen (Persero), dimana pada tahun 2017 terjadi kasus korupsi yang merugikan perusahaan sebesar Rp 98 miliar. Kasus terjadi berawal dari salah satu direksi perusahaan yang akan mendepositokan. Untuk kelima kalinya, PT. TASPEN memiliki Rp. 110 milyar, tapi hanya Rp. 12 miliar disimpan oleh Agoes. Sisa uang yang belum dibayar disimpan ke rekening atas nama PT. TASPEN dibuka oleh Agoes bekerjasama dengan Agus Saputra dan Arken. Saat membuka rekening ini, ketiganya turut menandatangani Dirut PT Taspen Achmad Subianto dan Chief Financial Officer Heru Maliksjah. Bukti fitur tangan diuji oleh Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri. Setelah uang itu masuk ke rekening PT Taspen, uang itu langsung ditransfer ke rekening Agus Saputra dan Arken yang menyimpan novel, dan ke cek penipuan yang disiapkan Agoes. Dari bantuan tersebut, Agoes Rahardjo mendapat komisi sebesar Rp 2,415 miliar. Sisanya dibawa oleh Agus Saputra serta Arken yang hingga saat ini masih dalam pencarian polisi guna dapat ditindak lebih lanjut. (Hasibuan, 2018).

Selain permasalahan tata kelola, perusahaan asuransi juga memiliki kecenderungan kinerja keuangan yang menurun. Diketahui perusahaan asuransi PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk mengalami penurunan laba hampir 12% pada kuartal III tahun 2018 (<https://finansial.bisnis.com/> diakses 22 Juli 2021). Berdasarkan laporan keuangan perusahaan,

penurunan juga terhadap pada pendapatan bruto mencapai 11,81% pada September 2018. Penurunan premi terbesar terhadap pada produk asuransi kendaraan bermotor yang mencapai 13,24%.

Permasalahan kinerja keuangan juga dialami PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk pada kuartal pertama di tahun 2018, yang tercatat mengalami kerugian bersih mencapai Rp 4,22 miliar. Perusahaan mengalami kerugian disebabkan karena menurunnya pendapatan premi, yang hiingga Maret 2018 mengalami penurunan mencapai 39,1% jika dibandingkan tahun sebelumnya (<https://keuangan.kontan.co.id/> di akses 22 Juli 2021).

C. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimana pengaruh GCG yang diproksikan dengan dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di BEI periode 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh GCG yang diproksikan dengan dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di BEI periode 2017-2019?
3. Bagaimana pengaruh GCG yang diproksikan dengan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di BEI periode 2017-2019?
4. Bagaimana pengaruh GCG yang diproksikan dengan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di BEI periode 2017-2019?

5. Bagaimana pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, serta kepemilikan institusional secara bersama – sama terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di BEI periode 2017-2019?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh GCG yang diproksikan dengan dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di BEI periode 2017-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh GCG yang diproksikan dengan dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di BEI periode 2017-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh GCG yang diproksikan dengan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di BEI periode 2017-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh GCG yang diproksikan dengan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di BEI periode 2017-2019.
5. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, serta kepemilik instutional secara bersama – sama terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di BEI periode 2017-2019.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang lengkap dan terpercaya dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada perkembangan ilmu pendidikan, terutama terkait dengan pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi.

3. Bagi Peningkatan Nilai Ekonomi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pengelolaan perusahaan secara profesional, sehingga tercapai kinerja keuangan yang maksimal.